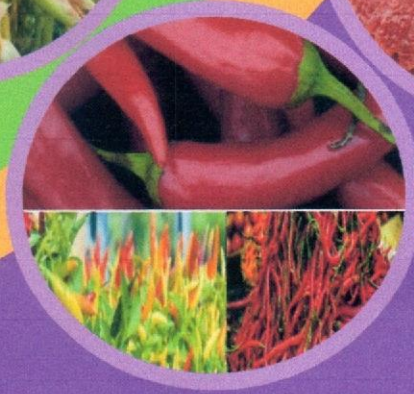




INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2021-2026



Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Berau



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
JALAN BUJANGGA Nomor : 01 Telp. 0554 22713
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BERAU

NOMOR: 010/237.1/DPP.1/IX/2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BERAU

- Menimbang, : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau;
- Mengingat, : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Memori penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
JALAN BUJANGGA Nomor : 01 Telp. 0554 22713
TANJUNG REDEB

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 berkaitan dengan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
JALAN BUJANGGA Nomor : 01 Telp. 0554 22713
TANJUNG REDEB

2016, Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau;
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 04 Januari 2020 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Berau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Pemerintah Kabupaten Berau.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
JALAN BUJANGGA Nomor : 01 Telp. 0554 22713
TANJUNG REDEB

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Pemerintah Kabupaten Berau.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator
Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten
Berau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 6 September 2021

Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan Kab. Berau, 

drh. Mustakim Suharjana
Pembina Utama Muda
NIP. 19670327 199403 1 005

KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2021-2026 merupakan indikator kinerja (*key performance*) yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau disusun dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 04 Januari 2020 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dan perubahan dari PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 ke PERMENDAGRI 21 Tahun 2011 selanjutnya KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020 berkaitan dengan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 6 September 2021
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Berau


Drh. Mustakim Suharjana
Pembina Utama Muda
NIP. 19670327 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG.....	1
MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
LANDASAN HUKUM.....	2
SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	4
BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	5
BAB III. PENUTUP.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau dalam bahasa Inggris disebut *Key Performance* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dengan baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagaimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kerja serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Oleh karena itu, dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempertimbangkan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Kebijakan umum OPD, kebutuhan data statistik, bidang kewenangan, tugas dan fungsi, kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan informasi kinerja serta dokumen strategis lainnya yang relevan.

Pada tataran OPD di daerah termasuk dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau penyusunan Indikator Kinerja Utama akan menyajikan indikator keluaran (output) dan indikator lainnya yang diperlukan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Indikator Kinerja Utama adalah sebuah proses dalam manajemen dengan merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus

dicapai dan disepakati, rumusan ini mencakup kegiatan yang dituntut untuk memberikan kontribusi berupa hasil kerja.

Adapun tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan IKU Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Memori penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 berkaitan dengan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016, Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 04 Januari 2020 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penyusunan

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam Bagian ini mendeskripsikan tentang latar belakang pengertian, landasan hukum, serta ruang lingkup dan sistematika penyusunan

2. Bab II Indikator Kinerja Utama

Bagian ini mengemukakan rumusan (Key Performance Indicator) berisikan ukuran/ indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Bab III Penutup

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Berau dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sebagai salah satu stake holder yang menangani bidang pertanian sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik didalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau mempertimbangkan harmonisasi antar unit dalam organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau dan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Berau. Selain itu, Indikator Kinerja Utama yang disusun juga mempertimbangkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan. Selanjutnya dalam konteks Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sesuai dengan peraturan akan berisi sekurang-kurangnya indikator keluaran (output).

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada OPD termasuk dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tidak hanya ditentukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan itu sendiri. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama juga ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menterjemahkan Indikator Kinerja secara lebih rinci dan spesifik dan selaras dengan dokumen lain yang ada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).

Adapun tolak ukur dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama yang baik sebagaimana juga telah dicoba diimplementasikan dalam

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. Spesifik, artinya Indikator yang disusun menggambarkan secara khas per tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.
2. Dapat dicapai (*Achievable*), artinya indikator yang ditetapkan memang rasional dan dapat dicapai.
3. Relevan, artinya indikator kinerja utama yang ditetapkan memang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan juga selaras dengan dokumen perencanaan lain yang telah disusun.
4. Menggambarkan Keberhasilan, artinya indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan keberhasilan atas Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Makro Pembangunan.
5. Measurable (Dapat Diukur), artinya indikator kinerja yang ditetapkan dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama yang disusun juga mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Rencana strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Peternakan.
3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Peternakan.
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Peternakan.
5. Evaluasi Rencana Kerja dan Rencana Strategis.
6. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel I. Target Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021-2026

Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	Ton/ha	3,07	3,15	3,26	3,37	3,49	3,62
		Produktivitas Jagung	Ton/ha	5,55	5,65	5,75	5,85	5,95	6,00
		Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	Ton/ha	3,62	3,77	3,90	4,02	4,17	4,25
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	Ton	472,35	474,71	477,09	479,47	481,87	484,28
		Produksi Telur Ayam Ras	Ton	1.805,59	1.859,76	1.915,55	1.973,02	2.032,21	2.093,17

Tabel 2. Penjabaran Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021-2026

- Instansi : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pejelasan/ Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	Produktivitas : Produksi Tanaman Padi dibagi dengan luas areal panen Padi	BPS, Data SP	Bidang Pertanian Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Pertanian
		Produktivitas Jagung	Produktivitas : Produksi Tanaman Jagung dibagi dengan luas areal panen Jagung		
		Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	Produktivitas : Produksi Tanaman Cabai dibagi dengan luas areal panen Cabai		
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	Produksi Daging Sapi di Kabupaten Berau	Laporan rekapitulasi data populasi, pemotongan, pemasukan, produksi dan konsumsi produk peternakan	Bidang Peternakan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Produksi Telur Ayam Ras	Produksi Telur Ayam Ras di Kabupaten Berau		

BAB III PENUTUP

Komoditas pertanian yang *ferishable*, voluminus, menyebabkan pasar komoditas pertanian sangat berisiko. Saat panen raya komoditas pertanian harganya anjlok dibawah harga standar akibat kurangnya daya beli lokal, dan ketidaktersedianya modal yang cukup, serta proses pascapanen yang kurang baik karena kondisi tenaga kerja yang terbatas.

Komoditas-komoditas lainnya juga berjalan dengan mekanisme pasar, namun volume yang kurang memadai dan tidak adanya kontinuitas menyebabkan harga-harga komoditas pertanian masih kurang mendapat perhatian.

Ketidak kontinyuan produk/hasil pertanian menyebabkan kita kurang mendapat peluang dalam berbagai kesempatan, tidak bisa melakukan kontrak, dan tidak mempunyai *bergaining position* yang baik karena memang kita tidak siap untuk memenuhi kebutuhan partai besar dan kontinyu setiap saat. Persoalan lainnya adalah ketidak seragaman produk dan kualitas yang kurang baik menyebabkan produk-produk kita kurang bisa masuk ke pasar modern bahkan ekspor.

Peningkatan pemahaman cara-cara penanganan pasca panen yang baik, pengolahan yang baik, serta pelabelan dan pengemasan menjadi prioritas sehingga produk kita mampu bersaing di pasar nasional bahkan luar negeri. Melakukan langkah-langkah untuk pembudidayaan komoditas yang berkelanjutan dan berskala usaha sehingga dapat ditingkatkan produksi dan produktivitasnya dan hasilnya dapat dipasarkan sesuai dengan permintaan yang kontinyu baik untuk pasar nasional bahkan pasar ekspor.

Begitu pula untuk sektor peternakan di Kabupaten Berau walaupun bukan menjadi sektor utama dalam program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, namun merupakan faktor yang sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata karena sektor peternakan memberikan kontribusi yang

sangat besar bagi indeks peningkatan daya beli masyarakat dan perekonomian masyarakat.

Ternak sapi merupakan salah satu ternak yang banyak dibudidayakan dan diusahakan petani di Kabupaten Berau. Ternak tersebut berperan sebagai sumber pendapatan, membuka kesempatan kerja dan sumber protein hewani. Populasi ternak sapi potong yang tinggi menunjukkan salah satu potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah dalam usaha ternak sapi, meningkatkan konsumsi gizi keluarga akan protein hewani bahkan sebagai komoditas agribisnis.

Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan antara lain melalui Pencegahan pemotongan ternak betina produktif, Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas RPH, Pengembangan integrasi ternak dan tanaman, Pengembangan pupuk organik dan biogas, Penyediaan dan pengembangan teknologi pakan dan lahan pakan, serta Pengembangan sarana dan prasarana ternak sapi.

Mengingat potensi produksi hasil pertanian pada sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Berau sangat besar, sementara permintaan terus meningkat, maka komoditas pertanian dan peternakan dapat menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif guna menunjang kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Berau. Oleh karena itu, pengembangan pertanian pada sektor pertanian dan peternakan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Pertanian dan Peternakan tetapi juga harus dapat dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan dinas/instansi lain yang terkait, baik antar subsektor maupun lintas sektoral. Selain itu dukungan dari pihak-pihak yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan seperti peneliti, penyuluh, asosiasi-asosiasi dan swasta juga sangat menentukan keberhasilan pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Berau.

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 5.2
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur	Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing	Indek Pembangunan Manusia Meningkat dari 74,71 Menjadi 76,69 Di akhir periode	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,32	13,53	14,10	14,29	14,47	14,65	14,83	14,83
					Rata-rata Lama Sekolah	9,52	9,69	9,70	9,84	9,98	10,12	10,26	10,26
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,06	72,17	72,28	72,38	72,49	72,60	72,71	72,71
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	9,30%	19,70%	29,60%	44,90%	66,60%	99,90%	100,00%	100,00%
2	Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi meningkat dari -3,35% menjadi 5,29% di akhir periode	Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	Tingkat Pengangguran terbuka	5,08	4,96	4,84	4,73	4,62	4,51	4,41	4,41
Menurunnya Angka Kemiskinan				Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5,19	5,13	5,07	5,01	4,95	4,90	4,84	4,84	
Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan		PDRB Per Kapita meningkat dari 148,9 Juta/tahun menjadi 164,848 juta/tahun diakhir periode	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	Presentase Usaha mikro dan kecil	24,00%	0,00%	6,00%	3,00%	2,00%	2,00%	3,00%	40,00%	
			Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	na	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,03	1,03	
			Meningkatnya Produksi Sektor Primer	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,64	11,71	11,79	11,86	11,94	12,01	12,09	12,09	
			Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	Score Pola Pangan Harapan	78,05	78,05	80	82	83	84,1	85,1	85,1	

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BRAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	3 0 7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	450.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 0 4	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	0,2%	300.000.000	0,2%	480.000.000	0,2%	640.000.000	0,2%	800.000.000	0,2%	960.000.000	0,2%	1.120.000.000	1%	4.300.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		0,97	3.143.574.986,00	0,98	22.460.160.000,00	0,99	18.035.000.000,00	1,00	21.695.000.000,00	-	23.500.000.000,00	-	27.220.000.000,00	1,03	116.053.734,986,00	
3	2 6 2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan	127.396 Orang	177.418 Orang	195.159 Orang	214.674 Orang	236.141 Orang	259.755 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Lama kunjungan Wisata	2 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	
3	2 6 3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dipasarkan	5 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2 6 5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	30 Orang	64.999.800	30 Orang	2.300.000.000	60 Orang	2.250.000.000	90 Orang	2.300.000.000	120 Orang	2.350.000.000	150 Orang	2.350.000.000	150 Orang	11.614.999.800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2 2 2	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Event	719.999.400	5 Event	2.665.000.000	6 Event	2.200.000.000	7 Event	3.500.000.000	7 Event	4.250.000.000	7 Event	4.950.000.000	7 Event	18.284.999.400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya Produksi Sektor Primer		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		11,64	12.865.602.880,00	11,79	65.550.658.000,00	11,86	35.293.200.000,00	11,94	38.345.000.000,00	12,01	34.871.950.000,00	12,09	37.778.145.000,00	12,09	224.704.555,880,00	
3	2 7 2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	Ton	2.235.000	2.250.000	2.317.500	2.385.000	2.475.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	Dinas Perkebunan
			Kelapa Dalam	3.483	4.071	5.571	6.871	8.371	9.471	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980		
			Kakao	788	900	1.200	1.400	1.595.000	1.700	1.754.500.000	1.929.950.000	2.100	2.122.945.000	2.100	2.100			
			Karet	82	185	205	255	300	400	515	515	515	515	515	515			
			Lada	827	919	1.019	1.219	1.340	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
3	2 7 3	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Luas Kebun yang dikembangkan	50	119.996.760	60	1.675.000.000	100	1.700.000.000	100	1.750.000.000	100	2.075.000.000	100	2.175.000.000	100	9.494.996.760	Dinas Perkebunan

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BRAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
		Prasarana Pertanian																			
3	2 7	5		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkebunan yang dikelola/ dibina (Hektar)	3.000	5000	306.283.916	6000	2.030.000.000	7500	2.460.000.000	10000	2.525.000.000	12500	2.580.000.000	15000	2.655.000.000	15000	12.556.283.916	Dinas Perkebunan
3	2 7	6		Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Penerapan Ijin Usaha yang dibina dan diawasi	15	15	174.991.800	15	450.000.000	20	550.000.000	20	550.000.000	25	650.000.000	25	650.000.000	130	3.024.991.800	Dinas Perkebunan
3	2 7	7		Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan /pembinaan	30 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	378.714.800	10 Kelompok Tani	1.150.000.000	10 Kelompok Tani	1.255.000.000	10 Kelompok Tani	1.275.000.000	10 Kelompok Tani	1.280.000.000	10 Kelompok Tani	1.285.000.000	60 Kelompok Tani	6.623.714.800	Dinas Perkebunan
3	2 7	2		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,07		3,15		3,26		3,37		3,49		3,62		3,62		
					Produktivitas Jagung	5	5,55		5,65		5,75		5,85		5,95		6		6		
					Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	4	3,62	2.789.898.494	3,77	22.124.500.000	3,9	9.945.000.000	4,02	10.920.000.000	4,17	12.120.000.000	4,25	13.332.000.000	4,25	71.231.398.494	
					Produksi Daging Sapi	470	472,35		474,71		477,09		479,47		481,87		484,28		484,28		
				Produksi Telur Ayam Ras	1.753	1805,59		1859,76		1915,55		1973,02		2032,21		2093,17		2093,17			
3	2 7	3		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	265	799.973.232	300	7.645.000.000	400	2.145.000.000	450	2.393.000.000	550	2.675.000.000	550	2.942.500.000	550	18.600.473.232	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	2 7	5		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	312	500	199.999.800	2535	2.788.900.000	3305	1.998.200.000	4000	2.477.500.000	4700	2.942.000.000	5000	3.236.200.000	5000	13.642.799.800	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	2 7	6		Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi	33	273.876.200	33	1.125.000.000	40	1.400.000.000	42	1.525.000.000	44	1.675.000.000	45	1.842.500.000	45	7.841.376.200	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	2 7	7		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	83	84	596.875.088	85	2.230.000.000	86	2.020.000.000	87	2.750.000.000	88	1.420.000.000	89	1.562.000.000	89	10.578.875.088	Dinas Pertanian dan Peternakan

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)	(14)
3	2	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkebunan yang dikelola/dibina (Hektar)	3.000	5000	306.283.916	6000	2.030.000.000	7500	2.460.000.000	10000	2.525.000.000	12500	2.580.000.000	15000	2.655.000.000	15000	12.556.283.916	Dinas Perkebunan	
3	2	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Penerapan Ijin Usaha yang dibina dan diawasi	15	15	174.991.800	15	450.000.000	20	550.000.000	20	550.000.000	25	650.000.000	25	650.000.000	130	3.024.991.800	Dinas Perkebunan	
3	2	7	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan/pembinaan	30 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	378.714.800	10 Kelompok Tani	1.150.000.000	10 Kelompok Tani	1.255.000.000	10 Kelompok Tani	1.275.000.000	10 Kelompok Tani	1.280.000.000	10 Kelompok Tani	1.285.000.000	60 Kelompok Tani	6.623.714.800	Dinas Perkebunan	
3	2	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,07	2.789.898.494	3,15	9.945.000.000	3,26	10.920.000.000	3,37	12.120.000.000	3,49	13.332.000.000	3,62	71.231.398.494	3,62	Dinas Pertanian dan Peternakan		
				Produktivitas Jagung	5	5,55		5,65		5,75		5,85		6		6					
				Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	4	3,62		3,77		3,9		4,02		4,17		4,25		4,25			
				Produksi Daging Sapi	470	472,35		474,71		477,09		479,47		481,87		484,28		484,28			
				Produksi Telur Ayam Ras	1.753	1805,59		1859,76		1915,55		1973,02		2032,21		2093,17		2093,17			
3	2	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	265	799.973.232	300	7.645.000.000	400	2.145.000.000	450	2.393.000.000	550	2.675.000.000	550	2.942.500.000	550	18.600.473.232	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	2	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan	Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9	8,5	1.443.104.326	9	2.050.000.000	9,5	2.410.000.000	10	2.620.000.000	10,5	2.780.000.000	11	3.058.000.000	11	14.361.104.326	Dinas Pertanian dan Peternakan	

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Masyarakat Veteriner	Surveils Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas	-	0,5	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
3	2	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	312	500	199.899.800	2535	2.788.900.000	3305	1.998.200.000	4000	2.477.500.000	4700	2.942.000.000	5000	3.236.200.000	5000	13.642.799.800	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	2	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi		33	273.876.200	33	1.125.000.000	40	1.400.000.000	42	1.525.000.000	44	1.675.000.000	45	1.842.500.000	45	7.841.376.200	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	2	7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	83	84	596.875.088	85	2.230.000.000	86	2.020.000.000	87	2.750.000.000	88	1.420.000.000	89	1.562.000.000	89	10.578.875.088	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	3	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.320.000.000		1.890.000.000		2.290.000.000		2.710.000.000		3.120.000.000		3.520.000.000		14.850.000.000	
3	3	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah SKA yang diterbitkan	250 SKA	100 SKA	80.000.000	120 SKA	100.000.000	150 SKA	150.000.000	180 SKA	200.000.000	200 SKA	250.000.000	220 SKA	260.000.000	1220 SKA	1.040.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	3	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola	2 Pasar	2 Pasar	250.000.000	3 Pasar	400.000.000	3 Pasar	450.000.000	4 Pasar	500.000.000	4 Pasar	550.000.000	4 Pasar	600.000.000	4 pasar	2.750.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	3	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	0,2%	0	300.000.000	0,2%	480.000.000	0,2%	640.000.000	0,2%	800.000.000	0,2%	960.000.000	0,2%	1.120.000.000	1%	4.300.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	3	5	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan			110.000.000		220.000.000		310.000.000		410.000.000	0	490.000.000	0	600.000.000		2.140.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Jumlah Produksi perikanan Budidaya	2.259,99 Ton	2.379,90 Ton	2.403,7 Ton	2.427,74 Ton	2.452,01 Ton	2.476,53 Ton	2.501,30 Ton	2.501,30 Ton
3	Tingkat kepatuhan pelaku utama perikanan terhadap peraturan perikanan dalam melakukan kegiatan perikanan		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan			4.486,31 Ton	4.620,90 Ton	4.759,53 Ton	4.902,32 Ton	5.049,39 Ton	5.049,39 Ton
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Jumlah Wisatawan	127.396 Orang	177.418 Orang	195.159 Orang	214.674 Orang	236.141 Orang	259.755 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang
2	Lama kunjungan Wisata	2 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari
3	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dipasarkan	5 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata
4	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	60 Orang	90 Orang	120 Orang	150 Orang	150 Orang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	Ton	2.235.000	2.250.000	2.317.500	2.385.000	2.475.000	2.520.000	2.520.000
2	Kelapa Dalam	3.483	4.071	5.571	6.871	8.371	9.471	9.980	9.980
3	Kakao	788	900	1.200	1.400	1.700	1.950	2.100	2.100
4	Karet	82	185	205	255	300	400	515	515
5	Lada	827	919	1.019	1.219	1.340	1.455	1.500	1.500
6	Luas Kebun yang dikembangkan		50	60	100	100	100	100	100
7	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkebunan yang dikelola/ dibina (Hektar)	3.000	5000	6000	7500	10000	12500	15000	15000
8	Jumlah Penerapan Ijin Usaha yang dibina dan diawasi	15	15	15	20	20	25	25	130
9	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan /pembinaan	30 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	60 Kelompok Tani
10	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,07	3,15	3,26	3,37	3,49	3,62	3,62
11	Produktivitas Jagung	5	5,55	5,65	5,75	5,85	5,95	6	6
12	Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	4	3,62	3,77	3,9	4,02	4,17	4,25	4,25
13	Produksi Daging Sapi	470	472,35	474,71	477,09	479,47	481,87	484,28	484,28

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Produksi Telur Ayam Ras	1.753	1.805,59	1.859,76	1.915,55	1.973,02	2.032,21	2.093,17	2.093,17
15	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	265	300	400	450	550	550	550
16	Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11
17	Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas	-	0,5	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
18	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	312	500	2.535	3.305	4.000	4.700	5.000	5.000
19	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi		33	33	40	42	44	45	45
20	Cakupan bina kelompok petani	83	84	85	86	87	88	89	89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Jumlah SKA yang diterbitkan	250 SKA	100 SKA	120 SKA	150 SKA	180 SKA	200 SKA	220 SKA	1220 SKA
2	Jumlah Pasar yang dikelola	2 Pasar	2 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	4 Pasar	4 Pasar	4 Pasar	4 Pasar
3	Presentase Stabilisasi harga barang Kebutuhan pokok dan barang penting								
4	Ekspor Bersih Perdagangan			0	0	0	0	0	
5	Jumlah Konsumen yang mendapatkan layanan Perlindungan Konsumen	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	140 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha
6	Jumlah Laporan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Presentase Pengendalian Izin Usaha Industri terhadap jumlah Industri yang terdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Pengawasan terhadap industri Kecil menengah	24%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	49%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
1	Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase transmigran yang ditempatkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase kawasan pemukiman yang di kembangkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									